

Meski Menurun Riau Masih Darurat Korupsi

A. Pendahuluan

1. Tren Korupsi

Tahun ini, Senarai mengumpulkan 27 perkara tindak pidana korupsi dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Temuannya, PNS dan kepala desa masih masuk dalam daftar koruptor. Namun, swasta lebih banyak, selain Dirut/Pegawai BUMDes, dosen, bupati dan Pegawai BUMD. Para koruptor ini berasal dari desa/kampung, perusahaan swasta, sekretariat daerah, perguruan tinggi, kecamatan, BUMD, UMKM, dinas dan kelurahan.

Mereka korupsi pengadaan barang dan jasa, APBDes, laporan fiktif, dana simpan pinjam, pinjaman kredit usaha, Pungli, APBD, dana hibah dan suap. Sebaran wilayahnya, Indragiri Hilir; Bengkalis; Pekanbaru; Kuantan Singingi; Siak; Pelalawan; Kampar; Rokan Hilir dan Indragiri Hulu. Meningkatnya kasus korupsi juga sejalan dengan bertambahnya jumlah uang korupsi dan kerugian negara. Sayangnya, hukuman bagi koruptor masih tergolong rendah atau kurang maksimal.

Dibanding tahun lalu, kasus korupsi memang menurun. Pada 2019, Senarai mengumpulkan perkara korupsi di PN Pekanbaru rentang Januari sampai 25 Juli. Ada 39 perkara. Rinciannya, Pengadaan barang dan jasa 17 perkara, APBD 2 perkara, pendidikan 2 perkara, dana desa 7 perkara dan 6 perkara lainnya. Terdakwanya, ASN 17 orang; Kades 7 orang; pegawai BUMN 1 orang dan 14 orang lainnya. Jumlah kerugian negara Rp 291.241.445.405. Korupsi tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau.

Jumlah perkara korupsi yang diadili di PN Pekanbaru memang turun-naik tiap tahunnya. Pada 2018, majelis telah memutuskan 64 perkara dengan kerugian negara Rp 150.991.237.378. Sedangkan 2017, sekitar 24 perkara dengan kerugian negara Rp 140 juta hingga Rp 265 Miliar. Sektor korupsi masih seputar APBD, pengadaan barang dan jasa, laporan fiktif serta dana desa. Para koruptor juga masih menyeret sejumlah ASN, kepala desa dan swasta.

Sebagai tambahan, Senarai juga mengumpulkan data penindakan kasus korupsi dari penegak hukum lainnya. Polda Riau menyelidiki 25 kasus. Rincian tahapan atau status hukumnya, sidik 13 kasus, P21 6 kasus, tersangka 8 kasus dan tahap dua 8 kasus. Dugaan kerugian negara hingga November 2020, Rp 12.615.621.425. Selain ditangani Ditreskrimsus Polda Riau, kasus tersebut juga berasal dari seluruh Polres maupun Polresta. Jumlah kasus korupsi meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang 2018 hingga 2019 ada 32 kasus, sedangkan 2017 ada 5 kasus.

Selain itu, data penindakan kasus korupsi 2020 juga diperoleh dari Kejati Riau. Ada 11 kasus dalam tahap penyidikan. Satu perkara masih P19 dan dua perkara telah P21. Korupsi itu berasal dari Pekanbaru, Rokan Hulu, Siak, Indragiri Hulu serta Kampar. Informasi itu tidak menjelaskan, apakah kasus tersebut ditangani oleh Kejati saja atau kejaksaan negeri di bawahnya.

Bedanya, 2018 dan 2019, kasus yang ditangani Kejati Riau lebih banyak. Selama dua tahun, ada 105 kasus dari 33 terdakwa. Jumlah kerugian negara Rp 27.069.971.373,53. Begitu juga pada 2017. Kejati Riau sendiri menangani 9 kasus, ditambah 43 kasus dari 12 kejaksaan negeri seluruh Riau.

2. Kepala Daerah Korup

Tahun ini, Riau juga ‘melahirkan’ dua kepala daerah korup. Diantaranya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin serta Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah. Amril telah dihukum 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan hak politiknya dicabut selama 3 tahun setelah jalani masa tahanan. Amril terima duit dari PT Citra Gading Asritama (CGA) Rp 5,2 miliar dalam proyek Jalan Duri-Sei Pakning.

KPK juga mengenakan pasal gratifikasi, karena sejak menjadi anggota DPRD maupun bupati, Amril terima duit bulanan dari dua pengusaha sawit sebanyak Rp 23 miliar lebih, lewat rekening istrinya, Kasmarni, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkalis 2020-2025.

Namun, Majelis Hakim PN Pekanbaru menyatakan Amril tak bersalah dengan dakwaan itu. Menurut majelis, kerjasama Amril dan dua pengusaha sawit itu murni perjanjian bisnis dan lagi pula, Amril rutin menyampaikannya dalam Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Jaksa KPK banding perihal pasal yang ditolak majelis tersebut.

Adapun Zulkifli Adnan Singkah telah ditahan KPK, sejak 17 November 2020, setelah ditetapkan tersangka, 3 Mei 2019. Zulkifli disangka menyuap Yaya Purnomo, Pegawai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, supaya meloloskan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2017 dan RAPBN 2018. Zulkifli juga diduga terima suap dan gratifikasi dari seorang kontraktor yang kerap dapat proyek di Dumai.

Amril Mukminin dan Zulkifli Adnan Singkah menambah deretan kepala daerah korup. Sebelumnya, tiga gubernur, Saleh Djasit; Rusli Zainal dan Annas Maamun. Selanjutnya, tujuh bupati, Rokan Hulu Ramlan Zast dan Suparman; Pelalawan Tengku Azmun Jaafar; Siak Arwin AS; Kampar Burhanuddin Husein; Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman dan Bengkalis Herliyan Saleh.

Pada 9 Desember 2020, delapan kabupaten dan satu kota di Riau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak.

Kuantan Singingi: Andi Putra-Suhardiman Amby, Mursini-Indra Putra dan Halim-Komperensi. Rokan Hilir: Cutra Andika-M. Rafiq, Suyatno-Jamiluddin, Asri Auzar-Fuad Ahmad dan Afrizal Sintong-H. Sulaiman. Siak: Sayed Assegaf-Reny, Alfedri-Husni dan Said Arif Fadillah-Sujarwo. Bengkalis: Kaderismanto-Iyeth Bustami, Abi Bahrhun-Herman Ahmad, Kasmarni-Bagus dan Indra Gunawan-Samsu. Kepulauan Meranti: Adil-Asmar, Hery Saputra-M. Khozin, Mahmuzin Thahir-Nuriman Khair dan Said Hasyim-Abdul Rauf.

Kemudian, Rokan Hulu: Hamulian-Sahril Topan, Sukiman-Indra Gunawan dan Hafith Syukri-Erizal. Indragiri Hulu: Nurhadi-Toni Sutianto, Rezyta Meilani Yopie-Junaidi Ahmad, Siti Aisyah-Agus Rianto, Wahyu Adi-Supriati dan Rizal Zamzami-Yogi Susilo. Pelalawan:

Abu Mansyur-Habibi, Zukri-Nasaruddin, Husni Thamrin-Edy Sabli dan Adi Sukemi-M Rais. Dumai: Hendri Sandra-M. Rizal Akbar, Eko Suharjo-Syarifah, Paisal-Amris dan Edi Sepen-Zainal Abidin.

Merujuk putusan perkara Tipikor PN Pekanbaru 2020, enam dari sembilan daerah yang akan memilih bupati/wakil bupati maupun wali kota/wakil wali kota, masuk dalam zona merah korupsi. Antara lain, Bengkalis; Kuantan Singingi; Siak; Pelalawan; Rokan Hilir dan Indragiri Hulu. Bupati Bengkalis dan Wali Kota Dumai bahkan tidak sempat menyelesaikan masa jabatan 2015-2020, karena terjaring korupsi. Pilkada serentak Bengkalis juga mengusung para calon yang disebut dalam kasus korupsi Amril Mukminin. Diantaranya, Indra Gunawan, Kaderismanto dan Kasmarni.

B. Temuan dan Analisis

1. ASN Masih Korup

Meski jumlahnya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, ASN di Riau masih saja korupsi. Mereka turut minta jatah dalam pengadaan barang dan jasa, buat laporan fiktif dan memungut biaya yang semestinya tidak diwajibkan alias pungutan liar. Meski Gubernur Syamsuar telah menerbitkan surat edaran larangan Pungli dan gratifikasi, sepertinya aturan itu belum ampuh untuk dipatuhi oleh perangkat di bawahnya. Tahun lalu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merekomendasikan Gubernur Riau, segera memecat dengan tidak hormat ASN terbukti korupsi. Pelaksanaannya perintah itu diserahkan ke daerah masing-masing ASN berdinis. Adapun jumlah ASN yang dimaksud, Kuantan Singingi 6, Rokan Hulu 4, Indragiri Hilir 17, Kampar 15, Pelalawan 17, Rokan Hilir 13, Siak 14, Bengkalis 28, Kepulauan Meranti 9, Dumai 19, Pekanbaru 10 ASN, Indragiri Hulu 9 dan Pemprov Riau 29.¹

2. Ratusan Miliar Kerugian Negara

Empat tahun terakhir, kerugian negara akibat korupsi berkisar Rp 132.104.520.262 sampai Rp 291.241.445.405. Andai tidak ada korupsi, uang tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, kesehatan dan mengentaskan kemiskinan di Riau. Apa lagi saat pandemi ini, uang itu juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha kecil terdampak covid-19, dengan kata lain memulihkan kembali perekonomian masyarakat. Bisa juga untuk mengatasi masalah kekurangan peralatan medis dalam menangani virus yang sudah hampir setahun ini menyerang.

3. Dua Kepala Daerah Melanggar Deklarasi Antikorupsi

Pada hari puncak Rembuk Integritas Nasional (RIN), sempena peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI), yang diselenggarakan KPK di Pekanbaru, 7-9 Desember 2016, Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Zulkifli Adnan Singkah, turut serta dalam deklarasi pembangunan integritas bersama gubernur, wali kota/bupati se-Indonesia. Satu dari lima isi deklarasi tersebut berbunyi, *sepakat menjadi pioner dalam pembangunan budaya integritas pada sektornya dengan mengajak dan melibatkan stakeholdernya.*

¹ <https://riaupos.jawapos.com/riau/00/00/0000/204959/25-kategoriberita-hiburan.html>

Sebaliknya, dua kepala daerah itu justru melanggar janjinya sendiri setelah terjerat korupsi. Bahkan, perbuatan mereka diikuti sejumlah ASN dan perangkat daerah di bawahnya. Itu menunjukkan, Amril Mukminin maupun Zulkifli Adnan Singkah tidak menjadi contoh yang baik dalam pencegahan korupsi di wilayahnya.

4. Petahana dan Nepotisme

Beberapa calon merupakan petahana, seperti, Suyatno; Alfedri; Mursini dan Sukiman. Beberapa calon lagi bahkan merupakan pimpinan DPRD Riau yang mencoba peruntungan di ranah eksekutif atau kembali ke daerah masing-masing, seperti, Asri Auzar, Zukri Misran dan Indra Gunawwan. Umumnya, para calon tersebut merupakan anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang baru terpilih 2019 lalu.

Selain petahana, Pilkada serentak ini juga memunculkan para calon yang memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin sebelumnya, dengan kata lain, melahirkan nepotisme. Pertama, Andi Putra, merupakan anak kandung mantan Bupati Kuantan Singingi Sukarmis, sekarang anggota DPRD Riau. Kedua, Adi Sukemi, juga anak kandung Bupati Pelalawan Muhammad Harris. Ini adalah masa jabatan terakhirnya.

Ketiga, Rezyta Meilani Yopie, istri Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto, yang juga akan berakhir masa jabatannya setelah dua periode. Keempat, Kasmarni, juga istri Bupati Bengkalis Amril Mukminin, yang telah dihukum 6 tahun penjara karena korupsi proyek Jalan Duri-Sei Pakning. Kasmarni juga menampung duit hasil perjanjian bisnis antara Amril dan dua pengusaha sawit, selama suaminya jadi anggota DPRD dan bupati. Hanya saja, dakwaan itu tidak terbukti di pengadilan.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Meski jumlah perkara korupsi tahun ini menurun, Riau masih saja darurat korupsi dan tetap dalam zona merah. Korupsi dilakukan kepala daerah, ASN hingga di desa. Daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember 2020, merupakan zona merah korupsi. Beberapa calon disebut dalam kasus korupsi dan bernuansa nepotisme.

1. Gubernur Syamsuar segera memecat ASN yang terbukti korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Syamsuar perlu berinovasi dengan mengeluarkan kebijakan yang kuat dalam mencegah korupsi.
2. Para pemilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 hendaknya memahami latar belakang calon. Setidaknya mereka harus bersih dari korupsi dan tidak terikat konflik kepentingan yang akan mengganggu kinerjanya selama memimpin.

Tabel Putusan Tipikor 2020

Senarai mengumpulkan putusan Tipikor PN Pekanbaru sepanjang Januari-November 2020. Senarai mendapatkannya dari Direktori Putusan Mahkamah Agung serta meminta langsung ke pengadilan, untuk putusan yang belum termuat di *website* tersebut. Supaya mudah memahaminya, Senarai mengelompokkan keterangan mengenai terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, hakim serta ahli dalam table.

No	Nama	Pekerjaan	Institusi	Klasifikasi Korupsi	Jumlah Korupsi	Kerugian Negara (Rp)	Pasal			Hukuman
							Dakwaan	Tuntutan	Putusan	
1.	Miswoyantas Parmin bin Tarman Alm	Kades	Desa Gerbang Sari	APBDes	Rp 18.981.627	Rp 351.371.627	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. - Pasal 3 jo Pasal 18 jo UU Tipikor Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana	-Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	- Penjara 5 tahun, denda Rp 200 juta rupiah), kurungan pengganti 2 bulan. - Bayar uang pengganti Rp 351.371.627
2.	Suhasman, S.Pi.,Msi bin Hasidun	PNS	Bagian Pelayanan Pertanahan Setda Kab. Kuantan Singingi	APBD Honorarium Kegiatan Penataan dan Inventarisasi Aset Tanah dan Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan dan	Rp 32.725.000	Rp 65.450.000	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	Dakwaan dan tuntutan tidak terbukti	Bebas

				Monitorin g						
3.	Dedi Susanto, Se.,Mpa bin H. Yurlis	PNS	Bagian Pelayanan Pertanaha n Sekretariat Daerah Kab.Kuant an Singingi	APBD	Rp 31.350.000	Rp 62.700.000	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. - Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. - Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.	Dakwaan dan tuntutan tidak terbukti	Bebas.
4.	Mega Fitri, S.P, M.S.I. binti Sofyan	PNS	Bagian Pelayanan Pertanaha n Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.	APBD	Rp 33.962.500	Rp 60.087.500	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. - Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	-	-	Bebas.
5.	Dr. Drs. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum	Dosen/ Ketua Tim Penelitian Bersama Kegiatan penelitian Bersama antara institute alam dan Tamadun	Universitas Islam Riau (UIR)	APBD, Dana Penelitian , hibah APBD	Rp 2.548.228. 670	Rp 2.633.228.6 70	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. - Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	- Penjara 4 tahun 8 bulan, denda Rp 300 juta, ganti kurungan 3 bulan. - Bayar uang pengganti Rp 1.877.728.670

		melayu (ATMA)- Univ. Kebangsaan Malaysia dan UIR					dan Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.			
6.	Inta bin Sasmita	Perangkat Desa	Kampung Kerinci Kanan Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak	APBD (Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Tahun Anggaran 2018 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan)	Rp 469.750.206	Rp 469.750.206	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 - Pasal 3 jo Pasal 18 - Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 - Pasal 3 jo Pasal 18 - Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor	- Penjara 5 tahun, denda Rp. 250 juta, ganti kurungan 6 bulan. -Bayar uang pengganti Rp 469.750.206
7.	Sadeli	Petani/ Kepala Kampung	Kampung Buntan Lestari.	APBKam Buntan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018.	Rp 538.825.168,87	Rp 538.825.168,87	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor	- Penjara 5 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta, ganti kurungan 3 bulan -Bayar uang pengganti Rp 538.825.168,87

8.	Syahnudi, S.Sos., M.Si. als Budi bin Hamzah	PNS	Camat Kuala Indragiri	APBD (anggaran kegiatan pekerjaan Pembang unan Kantor Lurah Sapat)	Rp 80.000.00 0	Rp 338.345.073	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. - Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.	- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor	- Penjara 1 tahun, Rp 50 juta, ganti kurungan 1 tahun - Bayar uang pengganti Rp 150 juta
9.	Abdul Samad als Samad bin M. Arsyad	Wiraswasta	-	Kegiatan pekerjaan pembang unan kantor lurah sapat	Rp 111.073.182	Rp 338.345.073	Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana -Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	-Penjara 4 tahun, denda 50 juta, subside 1 bulan penjara. - Bayar uang pengganti Rp 188.345.073
10.	Ari Kurniawan	Karyawan Swasta	Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Teluk Mesjid.	Dana UED-SP BUMKam Tunas Baru.	Rp 353.636.70 0	Rp 353.636.700	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP - Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1)	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP - Pasal 8 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP	- Penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan. - Bayar uang pengganti Rp 301.636.700,0 0

							KUHP			
11.	Rahmiwati	Analisis pemasaran Desk unit Pemasaran dan kredit Khusus (PMK) PT PER Riau	PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER)	Pinjaman kredit usaha	Rp 1.298.082.000	Rp 1.298.082.000	-Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana -Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	-Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	-Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	-Penjara 5 tahun, denda Rp 200 juta, subsider 1 bulan penjara. - Bayar uang pengganti Rp 1.298.082.000 dengan melelang harta benda atau subsider 1 tahun penjara.
12.	Zurman bin Musa	Wiraswasta	Direktur P.T. Dona Warisman Bersaudara	Pinjaman kredit	Rp 1.200.000.000	Rp 1.162.000.000			Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.	- Penjara 7 tahun, denda Rp 300 juta. -Bayar uang pengganti Rp 1.162.000.000.
13.	Irawan Saryono	Wiraswasta	Kelompok I-One Community	Angsuran dan Penerimaan Angsuran padarekening PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER)	Rp 490.000.000	Rp 530.000.000	-Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	-Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	-Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	-Penjara 4 tahun, denda Rp 200 juta, subsider 1 bulan penjara
14.	Makmur alias Aan	Direktur	PT. Mitra Bungo	APBD (proyek	Rp 60.500.000	Rp 105.881.991.	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU	- Penjara 6 tahun, denda

			Abadi	multi years, peningkatan Jalan Poros Pulau Rupa Ruas Batu Panjang Pangkalan Nyirih)	0.000	970,63	Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP - Pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.	Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Rp 500 juta, subsidair 3 bulan kurungan -Bayar uang pengganti Rp 60.500.000.000
15.	Wandri Zaldias Iwan bin Bakri	Wiraswasta	PT.Fadilah	Menerima dan meminta uang pengurusan paspor melebihi dari ketentuan yang berlaku kepada masyarakat / pihak pemohon	Rp 21.600.000	-	Pasal 5 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	Pasal 5 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	Pasal 5 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	- Penjara 2 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta, subsidair kurungan 3 bulan
16.	Jaafar bin alm. Karim	Wiraswasta	Desa Bukit Batu.	APBD	Rp 192.314.000	Rp 1.053.755.000	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana	- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana	- Penjara 3 tahun, denda Rp 150 juta, subsidair kurungan 3 bulan - Bayar uang pengganti Rp

							UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana			192.314.000
17.	Andri Wahyudi bin Rozali	Wiraswasta	UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana	Dana Usaha desa	Rp 549.671.000	Rp 1.053.755.000	- Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana -Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	-Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 4 tahun, denda Rp 150 juta, subsider 3 bulan kurungan -Bayar uang pengganti Rp 548.837, subsider 2 tahun penjara.
18	Subandi bin Saleh	Wiraswasta	UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana Desa Bukit Batu.	Dana Usaha Desa	Rp 312.604.000	Rp 1.053.755.000	- Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 4 tahun, denda Rp 150 juta, subsider 3 bulan kurungan -Bayar uang pengganti Rp 312.604.000, subsider 2 tahun penjara.
19.	Juliansyah S.Sos bin alm Rosidi	Pegawai Negeri Sipil	Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Inhil	Dana penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana	Rp 75.000.000	Rp 8.414.259.598,30	-Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana -Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1	-Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	-Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 3 tahun, denda Rp 50 juta - Bayar uang pengganti Rp 75 juta

				Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Inhil			KUHPidana			
20.	Darman S.Sos bin alm Fadir Ibrahim	Pengawai Negeri Sipil	Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Inhil	Dana penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Inhil	Rp 25.000.000	Rp 8.414.259.598,30	-Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana -Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	-Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 3 tahun, denda Rp 50 juta, subsider 1 bulan penjara - Bayar uang pengganti Rp 25 juta
21.	Muhidin Shaleh als. Muhidin	Wiraswasta	PT. Bahana Prima	Kegiatan Penyedia	Rp 297.000.00	Rp 8.414.259.5	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU	- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo	- Penjara 3 tahun, denda

			Nusantara.	an dan Pengelola an Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigr asi Desa Tanjung Melayu Kabupate n Indragiri Hilir	0	98,30	Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.	Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	Rp. 50 juta, subside 1 bulan -Bayar uang pengganti Rp 297 juta
22.	Muliadi Sitorus, ST	Swasta	CV. Saidina Consultan	APBD (Pemban gunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kecamata n Kuala Indragiri, Kabupate n Indragiri Hilir TA 2016)	Rp 179.020.00 0	Rp 586.577.152, 70	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	- Penjara 3 tahun, denda Rp 50 juta, subsider 1 bulan - Bayar uang pengganti Rp 179.020.000
23.	Gunanto als Igun bin H. Sukarmin	Swasta/ Pejabat Pelaksana	Dinas Tenaga Kerja,	APBD Penyedia- an dan	Rp 94.000.00 0	Rp 8.304.459.5 98,30	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55	- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1	- Penjara 3 tahun,denda Rp 50 juta,

		Teknis Kegiatan (PPTK)	Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau	Pengelola-an Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi Di kawasan Transmigrasi Di Desa Tanjung Melayu Kab. Inhil			Ayat (1) ke 1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP	Ayat (1) ke 1 KUHPidana	KUHP	subsider 1 bulan - Bayar uang pengganti Rp 94 juta
24.	Narso als Narso	Wiraswasta	Desa Bahtera Makmur.	PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pungli	Rp 318.000.000	-	- Pasal 12 Huruf e UU Tipikor - Pasal 11 UU Tipikor.	- Pasal 11 UU Tipikor.	- Pasal 11 UU Tipikor.	-Penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan penjara
25	Edi Arifin als Edi bin Arifin	Pegawai Negeri Sipil	kelurahan Pangakalan Kerinci.	Pungli pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)	Rp 100.000.000	-	Pasal 12 Huruf e UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana -Pasal 11 Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana	-Pasal 11 Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana	-Pasal 11 Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana	-Penjara 1 tahun 4 bulan, denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan penjara
26.	Suheri Terta	Mantan Bagian Humas & Legal (Manager	PT. DUTA PALMA GROUP Kantor Perwakilan	Suap Revisi alih fungsi hutan Riau	Rp 3.770.000.000	-	- Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	- Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	Dakwaan dan tuntutan tidak terbukti	Bebas

		Perizinan dan Dokumentasi	Pekanbaru (Riau)				- Pasal 13 Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	- Pasal 13 Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP		
27	Amril Mukminin	Bupati Bengkalis	Bengkalis	Suap proyek jalan dan gratifikasi	Rp 5.200.0000 .000		- Pasal 12 Huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. - Pasal 11 A UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana - Pasal 12 B Ayat 1 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana	- Pasal 12 Huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. - Pasal 11 A UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana - Pasal 12 B Ayat 1 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana	- Pasal 12 Huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana	- Penjara 6 tahun, denda Rp 500 juta dan pencabutan hak politik 3 tahun setelah jalani masa kurungan

- Jabatan paling korup, terdakwa dengan status swasta 9 kasus, PNS 7 kasus, Kepala Desa 5 kasus, Dirut/Pegawai BUMDes 3 kasus, dosen 1 kasus, bupati 1 kasus dan Pegawai BUMD 1 kasus.
- Institusi paling korup, desa/kampung dengan 7 kasus, perusahaan swasta 6 kasus, sekretariat daerah 3 kasus, BUMDes 3 kasus, perguruan tinggi 1 kasus, kecamatan 1 kasus, BUMD 1 kasus, UMKM 1 kasus, dinas 1 kasus dan kelurahan 1 kasus.
- Klasifikasi korupsi antara lain, pengadaan barang dan jasa 8 kasus; APBDes 3 kasus; laporan fiktif 3 kasus; dana simpan pinjam 3 kasus; pinjaman kredit usaha 3 kasus; Pungli 3 kasus; APBD 1 kasus; dana hibah 1 kasus dan suap 1 kasus.
- Wilayah terkorup antara lain, Indragiri Hilir 7 kasus; Bengkalis 5 kasus; Pekanbaru 4 kasus; Kuantan Singingi 3 kasus; Siak 3 kasus; Pelalawan 2 kasus; Kampar 1 kasus; Rokan Hilir 1 kasus; Indragiri Hulu 1 kasus.
- Jumlah uang korupsi sepanjang 2020 di Riau Rp 78.840.824.053,8 dengan kerugian negara Rp 132.104.520.262
- Rata-rata vonis 3-5 tahun penjara. Putusan terendah 1 tahun dan paling tinggi 7 tahun. Dari 27 perkara Tipikor tersebut, 4 diantaranya divonis bebas oleh majelis hakim PN Pekanbaru.
- Rata-rata denda Rp 50.000.000 sampai Rp 200.000.000. Denda paling tinggi Rp 800.000.000
- Umumnya, penuntut umum dan majelis hakim menggunakan Pasal 2 UU Tipikor saat menuntut dan menghukum terdakwa. Meski, dalam dakwaan terdapat beberapa pasal lain, baik dalam bentuk alternatif maupun kumulatif.

1. Penasehat hukum

No.	Nama	Kantor Hukum/ alamat	Klien/Terdakwa
1.	Yudha Parulian, SH dan Azman Hadi, SH,	Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (LBH FMM)	MISWOYANTO ALS PARMIN BIN TARMAN. ALM
2.	1.Suroto,S.H., 2. Joko Prasetyo,S.H., 3. Sunan Ali Harahap, SH, MH, 4. Terry Dwiseptiawan, SH. 5. Sutriadi, SH.,	Advokat, berkantor pada kantor Pengacara Suroto & Rekan, beralamat di Jalan Hang Tuah Nomor 48 Pekanbaru,	SUHASMAN , S.PI.,MSI Bin HASIDUN
3.	1. Suroto,S.H., 2. Joko Prasetyo,S.H., 3. Sunan Ali Harahap, SH, MH, 4. Terry Dwiseptiawan, SH. Dan 5. Sutriadi, SH.,	Kantor Pengacara Suroto & Rekan, beralamat di Jalan Hang Tuah Nomor. 48 Pekanbaru.	DEDI SUSANTO, SE.,MPA Bin H. YURLIS
4.	1. Suroto,S.H., 2. Joko Prasetyo,S.H., 3. Sunan Ali Harahap, SH, MH, 4. Terry Dwiseptiawan, SH. Dan 5. Sutriadi, SH.,	Advokat, di kantor Pengacara Suroto & Rekan, beralamat di Jalan Hang Tuah Nomor 48 Pekanbaru	MEGA FITRI, S.P, M.S.I. Binti SOFYAN
5.	1. S. Marbun, SH.,MS 2. Jufri Efendi, SH 3. Agus Chrisman Manurung, SH 4. Artha Yulvida, SH	Advokat/Pengacara pada Law Firm “S. Marbun, SH., MS – Jufri Efendi, SH & Associates” beralamat kantor di Jalan Paus No.87 Pekanbaru.	DR. Drs. H. ABDULLAH SULAIMAN, M.Hum
6.	Tidak didampingi penasihat hukum	-	INTA Bin SASMITA
7.	Tidak didampingi penasihat hukum	-	SADELI
8.	MOH. ARSYAD, SH., MH,	Advokat/ Pengacara Dan Legal Konsultan MOH. ARSYAD & Rekan berkantor di Jalan Trimas Tembilahan, Kelurahan Tembilan Kota, Kecamatan Tembilan Inhil-Riau,	SYAHBUDI, S.Sos., M.Si. Als BUDI Bin HAMZAH
9.	1. Wandii 2. Zainuddin	Kantor Advokat madani Jalan Pekan Arba No 88 Kel Pekan Arba, Kec Tembilahan. Indragiri Hilir	ABDUL SAMAD Als SAMAD Bin ARSYAD

10.	1. Hasrizal, SH, 2. Santo Siregar,SH,	Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Riau yang berkantor di Jl. Harapan Raya No.68 A Lantai II Pekanbaru	ARI KURNIAWAN
11.	1. Noor Aufa, 2. Adriadi, 3. Alkhoviz Syukri, 4. Tri Alda Putra, 5. Rori Fernandes, 6. Risky Dermawan	NA_Lawyer: Advocates-legal Consultans-Mediator-Legal Auditor. Pada perumahan Hang Tuah Home Blok C5 Jalan Sialang Bungkuk No 3 Pekanbaru.	Rahmiwati
12.	1. ILHAMDI, S.H.,M.H., 2. DEDY SAPUTRA,S.H.,M.H., 3. HAFIS VIVALDI AKBAR, S.H.,M.H., 4. ANDI MATIAS GIOVANI BARUTU, S.H., dan 5. MUHAMMAD FATHRA FAHASTA, S.H.,M.H.,	Advokat di Kantor Hukum ILHAMDI, S.H.,M.H.& PARTNERS beralamat di jalan Kubang Raya, Perum Astam House F-10, Panam-Pekanbaru.	ZURMAN BIN MUSA
13.	1. Muhammad Rais Hasan, 2. Zulherman Idris, 3. Darlis, Firdaus, 4. Trie Andu Pratiknyo, 5. Alamsah, 6. Satria Saimona Rindupati, 7. Mirwansyah, 8. Tiodora Krismusti	Kantor hukum RHP Law Firm. Jalan Jenderal Sudirman No 11 ghotel Ratu mAyang Garden Arcade 6)	IRAWAN SARYONO
14.	1. Aldres Jonathan Napitupulu, SH 2. Jefri, SH.,MH 3. Kresna Hutauruk, SH 4. Charles Situmorang, SH 5. Tulus H. Simanjuntak, SH 6. Gilang Gustya Pratama, SH	NKHP LAW FIRM yang beralamat kantor di Gedung Yarnati Lantai 4-403 Jalan Proklamasi Nomor 44 Menteng Jakarta Pusat.	MAKMUR alias AAN
15.	1. RIO CHANDRA KESUMA,SH 2. MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN,SH	BANTUAN HUKUM “ POETRA NUSANTARA” yang beralamat di Jalan Kalimantan 8	WANDRI ZALDI ALS IWAN BIN BAKRI

	4. M.RANDY PRATAMA,SH 4. IRIANSYAH,SH	Blok F4 No. 47-48 Sektor 14-4 Nusaloka BSD City, Tangerang Selatan	
16.	Tidak didampingi penasehat hukum		JAAFAR Bin Alm. KARIM
17.	Tidak didampingi penasihat hukum	-	ANDRI WAHYUDI Bin ROZALI
18	Tidak didampingi penasihat hukum	-	SUBANDI Bin SALEH
19.	1. SS Matondang, 2. Noor Aufa, 3. Alkhoviz Syukri, 4. Try Alda Putra, 5. Adha Nuraya	Kantor hukum Matondang dan Sikumbang. Jalan Lembaga Pemasarakatan No 7a, Branch Office Elite Hotel Jl H Arsyad Ahmad Tembilahan Riau.	Juliansyah S.Sos Bin Alm Rosidi
20.	1. Khairul Azwar Anas, 2. Fitri Andrison, 3. Afrimatika Dewi	Kantor Law PPFICE KHARNAS & Partner. Jalan tambusai Kompleks Nangka Sari N Blok E No 2 Kota Pekanbaru.	Darman S.Sos Bin Alm Fadir Ibrahim
21.	1. ABU BAKAR J LAMATAPO, SH, 2. IBRAHIM KOPONG BALI, SH, 3. UMAR HASAN, SH, 3. RIKI IKRIMAL, SH, 4. HAMZA HUSEN, SH, 5. Drs. AHMAD YANUI, SH, MH, CLA, 6. RONI GUNAWAN, SH, 7. SARWO SADDAM MATONDANG, MH, 8. SUPRIADI, SH, CLA 9. MUSTAFA TAPO RATULOLI, SH	Advokat dan konsultan Hukum dari <i>Law Office Abu Bakar J. Lamatapo, SH & Associates</i> berkedudukan di Jakarta, di Menara The Boulevard 6 th floor Suite D-1 Jl. Fachrudin Raya No. Jakarta Pusat 10250 INDONESIA dan Kantor Perwakilan Riau di Jalan Hangjebat No. 88 C Kampung Kelapa, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru - Riau	MUHIDIN SHALEH Als. MUHIDIN
22.	Tidak didampingi penasehat hukum		MULIADI SITORUS, ST
23.	1. SS MATONDANG, SH., MH, 2. NOOR AUFA, SH., CLA, 3. ALKHOVIZ SYUKRI, SH, 4. TRY ALDA PUTRA, SH, 5. ADHA NURAYA, SH,	Advokat/Pengacara pada kantor Hukum MATONDANG & SIKUMBANG, Head Office Jl. Lembaga Pemasarakatan No. 7 A Pekanbaru, Branch Office Elite Hotel Jl. H. Arsyad Ahmad Tembilahan Riau,	GUNANTO ALS IGUN BIN H. SUKARMIN
24.	Tidak didampingi penasehat hukum		NARSO Als NARSO
25.	1. Asep Ruhiat,	Kantor hukum Asep Ruhiat & Partner jalan Handayani No	EDI ARIFIN Als EDI Bin ARIFIN

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Artion, 3. Malden Richardo Siahaan, 4. Eko Indrawan, 5. Miftahul Ulum, 6. Wiryata Atmaja, 7. Fauziah Aznur, 8. Wahyu Yandika, 9. Faizil Adha, 10. Aswandi, 11. Ahmad Razali. 	369 Lt III Arengka Atas pekanbaru.	
26.	<ul style="list-style-type: none"> 1. NOVIAR IRIANTO, S.H. 2. TEUKU RAJA RAJUANDAR, S.H. 3. CITRA F.H. PERTIWI SIREGAR, S.H. 4. DANIEL OCTAVIANUS, S.H. 	Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Noviar Irianto & Parners (NIP) Law Firm, berkantor Di Gedung Graha Iskandarsyah, Lantai 11, Jalan Iskandarsyah Raya No. 66-C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.	SUHERI TERTA
27.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Asep Ruhiat 2. Faizil Adha 3. Patar Pangasih 4. Wan Subantriarti 5. Wiryata Atmaja 6. Herbet Abraham P 7. Tairan 	Kantor hukum Asep Ruhiat & Partner jalan Handayani No 369 Lt III Arengka Atas pekanbaru.	AMRIL MUKMININ

- a. Advokat/pensihat hukum yang sering dan beberapa kali mendampingi terdakwa Tipikor antara lain, Kantor Pengacara Suroto & Rekan; Kantor Hukum Matondang & Sikumbang serta Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partner. Asep dan kawan-kawan, juga merupakan tim penasihat hukum mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

2. **Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

No.	Nama	Institusi	Klien		Pasal		Besarnya Tuntutan
			Terdakwa	Jabatan	Dakwaan	Tuntutan	
1.	Amri Rahmanto Sayekti, Sh.,Mh	Kejaksaan Negeri Kampar	Miswoyanto als Parmin bin Tarman alm	Mantan Kepala Desa Gerbang Sari	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana	- Penjara 6 tahun dan 6 bulan, denda Rp 200 juta, ganti kurungan 3 bulan - Bayar uang pengganti Rp 351.371.627
2.	Muhammad Gempa Awaljon Putra, S.H., M.H.,	Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	Suhasman , S.Pi.,Msi bin Hasidun	Kabag Pelayanan Pertanahan Setda Kab. Kuantan Singingi	- Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Ayat 1 Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP	- Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	- Penjara 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp 100 juta. subsidiair 6 bulan kurungan - Bayar uang pengganti Rp 65.450.000
3.	Muhammad Gempa Awaljon Putra, S.H.,M.H.,	Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	Dedi Susanto, Se.,Mpa Bin H. Yurlis	Kasubag Pengaturan Peguasaan Dan Hak Atas Tanah pada Bagian Pelayanan	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1	- Penjara 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta, subsidiair 3 bulan kurungan - Bayar uang pengganti Rp.

				Pertanahan Sekretariat Daerah Kab.Kuantan Singingi	KUHP.	KUHP.	62.700.000
4.	Muhammad Gempa Awaljon Putra, S.H., M.H.,	Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	Mega Fitri, S.P, M.S.I. Binti Sofyan	PJ. Kepala Sub Bagian Pengelolaa n Tanah pada Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 dan PPTK kegiatan Penyelesaia n Konflik Pertanahan dan Monitoring Permasalah an Pertanahan Tahun Anggaran 2015,	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke–1 KUHP	- Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke–1 KUHP	- Penjara 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta - Bayar uang pengganti Rp 62.700.000

5.	Rm. Yusuf Trisnajaya, Sh.,Mh	Kejaksaan Negeri pekanbaru	Dr. Drs. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum	Dosen	<p>- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>- Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>- Penjara 7 tahun, denda Rp 300 juta, subsidair 3 bulan kurungan</p> <p>- Bayar uang pengganti Rp 1.962.728.670</p>
6.	Arie Daryanto, S.H.	Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura	Inta Bin Sasmita	Perangkat Desa	<p>- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor</p> <p>- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor</p> <p>- Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor</p>	<p>- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor</p> <p>- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor</p> <p>- Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor</p>	<p>- Penjara 5 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahana, denda Rp 250 juta, subsidair 6 bulan kurungan</p> <p>-Bayar uang pengganti Rp 469.750.206</p>
7.	Arie Daryanto, Sh	Kejaksaan siak	Sadeli	Kepala Kampung	<p>- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU UU Tipikor</p> <p>- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor</p>	<p>- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU UU Tipikor</p>	<p>- Penjara 6 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan, denda Rp 250 juta, subsidair 6 bulan Kurungan</p> <p>- Bayar uang pengganti Rp</p>

							538.825.168,87
8.	Yoyok Satrio, Sh,	Kejaksaan Negeri Indra Giri Hilir,	Syahbudi, S.Sos., M.Si. Als Budi Bin Hamzah	Camat Kuala Indragiri	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	- Penjara 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta, subsidair 1 bulan kurungan - Bayar uang pengganti sebesar Rp 150 juta
9.	Yoyok Satrio	Indragiri Hilir	Abdul Samad Als Samad Bin Arsyad	Pengguna Anggaran	- Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan - Bayar uang pengganti Rp 188.345.073
10.	Wirawan Prabowo .,SH.	Kejaksaan siak	ARI KURNIAWAN	Mantan Direktur Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Teluk Mesjid. Tata Usaha (TU) di Usaha Ekonomi Desa-	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor Pasal 64 Ayat (1) KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP - Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor Pasal 64 Ayat (1) KUHP - Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP	- Penjara 5 tahun dikurangi masa penahanan, denda Rp 200 juta, subsidair 4 bulan kurungan - Bayar uang pengganti Rp 301.636.700

				Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Teluk Mesjid, Kab. Siak dari tahun 2009 s.d 2013			
11.	Nofrizal	Pekanbaru	Rahmiwati	Analisis pemasaran Desk unit Pemasaran dan kredit Khusus (PMK) PT PER Riau	-Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana -Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	-Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	Penjara 8 tahun 6 bulan, denda Rp 300 juta
12.	Perkara banding Pengaduan Tinggi Pekanbaru, tidak dihadiri oleh penuntut umum	Pelalawan	Zurman Bin Musa	Direktur P.T. Dona Warisman Bersaudara	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	- Penjara 8 tahun, dikurangi masa Tahanan, denda sebesar Rp 300 juta, subsidair 6 bulan penjara. - Bayar uang pengganti Rp 1.162.000.000
13.	Rully Affandi	Pekanbaru	Irawan Saryono	Ketua Kaelompok I-One Com Community	- Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana	- Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 5 tahun, denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan penjara.

14.	Eko Wahyudi Prayitno	KPK	Makmur alias Aan	Direktur PT. Mitra Bungo Abadi	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP	- Penjara 10 tahun, denda Rp 800 juta, subsidair kurungan 6 bulan - Bayar uang pengganti Rp 60.500.000.000
15.	R.M.Yusuf Trisnajaya,Sh., Mh	Kejaksaan Negeri Pekanbaru	Wandri Zaldi Als Iwan Bin Bakri	Direktur PT.Fadilah	- Pasal 5 Ayat (1) Huruf (b) UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	- Pasal 5 Ayat (1) Huruf (b) UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	- Penjara 2 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan, denda Rp 50 juta, subsidair 5 bulan kurungan
16.	Doli Novaisal, S.H.,M.H.,	Kejaksaan negeri Bengkalis	Jaafar Bin Alm. Karim	Kades Bukit Batu 2014 s/d 2019	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana	- Penjara 4 tahun, denda Rp 200 juta, subsidair 3 bulan kurungan - Bayar uang pengganti Rp 192.314.000
17	Doli Novaisal	Bengkalis	Andri Wahyudi Bin Rozali	Ketua UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana tahun 2012-2019	- Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 5 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta - Bayar uang pengganti Rp 548.837.000

18	Doli Novaisal	Bengkalis	Subandi Bin Saleh	Tata Usaha UED_SP Tri Bukit Batu Laksemana Desa Bukit Batu Kabupaten bengkalis taahun 2012-2019	- Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 5 tahun, denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan penjara - Bayar uang pengganti Rp 312.604.000
19.	Muhammad Juan Sitorus	Indragiri Hilir	Juliansyah S.Sos Bin Alm Rosidi	Kuasa pengguna Anggaran dan pejabat pembuat komitmen pada Kegiatan Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Inhil	- Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 3 tahun, denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan penjara - Bayar uang pengganti Rp 1.298.082.000 dengan melelang harta benda atau pidana penjara 4 tahun 3 bulan.
20.	Muhammad Juan Sitorus	Indragiri Hilir	Darman S.Sos Bin Alm Fadir Ibrahim	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri	- Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 3 tahun, denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan penjara

				Inhil			
21.	Muhammad Juan Sitorus, SH	Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	Muhidin Shaleh Als. Muhidin	Direktur PT. Bahana Prima Nusantara (Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir)	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KHUPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KHUPidana	- Penjara 5 tahun, denda Rp 200 juta, subsidair 3 bulan kurungan - Bayar uang pengganti Rp 350 juta
22.	Muhammad Juan Sitorus, SH	Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	Muliadi Sitorus, ST	Direktur CV. Saidina ConsultanS	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	- Penjara 2 tahun, denda Rp 50 juta, subsidair 3 bulan kurungan - Bayar uang pengganti Rp 109.800.000
23.	Muhammad Juan Sitorus, SH	Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	Gunanto Als Igun Bin H. Sukarmin	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudu	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana - Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.	- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana	- Penjara 8 tahun dan 6 bulan, denda Rp 200 juta, subsidair 3 bulan kurungan - Bayar uang

				kan Propinsi Riau			pengganti Rp 7.954.459.598,30
24.	Herlina Samosir, S.H., M.H.,	Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	Narso Als Narso	Penghulu Bahtera Makmur(pe nyelenggar a negara)	- Pasal 12 Huruf e UU Tipikor - Pasal 11 UU Tipikor	- Pasal 11 UU Tipikor	- Penjara 2 tahun, denda Rp 50 juta
25.	Jodi Valdano	Kejaksaan Negeri Pelalawan	Edi Arifin Als Edi Bin Arifin	Lurah Pangakalan Kerinci. Eks Kasi Pemerintah an Kecamatan Pelalawan	- Pasal 12 Huruf e UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana - Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana	- Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana	- Penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta
26.	Nur Haris Arhadi dkk	Komisi Pemberan tasan Korupsi Jakarta	Suheri Terta	Revisi Alih Fungsi Hutan Riau	- Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. - Pasal 13 UU jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	- Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.	- Penjara 4 tahun, denda Rp 150 juta, subsidiar 6 bulan kurungan.
27.	Tonny F. Pangaribuan	KPK	Amril Mukminin	Bupati Bengkalis	Pasal 12 huruf A UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 (1) KUHPidana. Pasal 11 A UU Tipikor jo pasal 64 ayat 1 (1)KUHPidana. Pasal 12 B Ayat 1 Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 (1) KUHPidana.	Pasal 12 huruf A UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 (1) KUHPidana. Pasal 11 A UU Tipikor jo pasal 64 ayat 1 (1)KUHPidana. Pasal 12 B Ayat 1 Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 (1) KUHPidana.	- Penjara 6 tahun denda Rp 500 juta Dan cabut hak politik 3 tahun

- a. Kejaksaan yang paling banyak menangani kasus Tipikor, Indragiri Hilir 7 kasus, Pekanbaru 4 kasus, Kuantan Singingi 3 kasus, Siak 3 kasus, Bengkalis 3 kasus, KPK 3 kasus, Pelalawan 2 kasus, Kampar 1 kasus dan Rokan Hilir 1 kasus.
- b. Rata-rata tuntutan 1,6 tahun sampai 5 tahun. Tuntutan paling rendah 1 tahun dan paling tinggi 10 tahun. Tuntutan jaksa jauh dari maksimal. Padahal, jaksa banyak menggunakan Pasal 2 Ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hukumannya seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
- c. Hanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang menuntut separuh dari hukuman maksimal. Yakni pada terdakwa Makmur alias Aan dan Wandri Zaldi alias Iwan Bin Bakri.
- d. Rata-rata denda yang dituntut juga paling minimal atau paling rendah dari hukuman. Hanya KPK yang menuntut denda hampir mendekati maksimal atau lebih dari separuh hukuman.

3. **Hakim**

No.	Nama	Terdakwa / Jabatan	Pasal Putusan	Vonis
1.	1. Sarudi, SH 2. Yudissilen, SH.,M 3. Hendri, SH.,MH	Miswoyanto Als Parmin Bin Tarman Alm	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	- Penjara 5 tahun, denda Rp 200 juta, diganti pidana kurungan 2 bulan - Bayar uang pengganti Rp 351.371.627
2.	1. Yudisilen, S.H. M.H., 2. Sarudi, S.H., 3. Yanuar Anadi, SH, MH, MKN	Suhasman , S.Pi., Msi Bin Hasidun	Dakwaan dan tuntutan tak terbukti	Bebas
3.	1. Yudisilen, S.H. M.H., 2. Sarudi, S.H., 3. Yanuar Anadi, SH, MH, MKN	Dedi Susanto, Se., Mpa bin H. Yurlis	Dakwaan dan tuntutan tak terbukti	Bebas
4.	1. Yudisilen, S.H. M.H., 2. Sarudi, S.H., 3. Yanuar Anadi, SH, MH, MKn	Mega Fitri, S.P, M.S.I. Binti Sofyan	Dakwaan dan tuntutan tak terbukti	Bebas

5.	1. Saut Maruli Tua Pasaribu, SH.,MH 2. Sarudi, SH 3. Hendri, SH.,MH	Dr. Drs. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	- Penjara 4 tahun 8 bulan, denda Rp 300 juta, subsidair kurungan 3 bulan - Bayar uang pengganti Rp 1.877.728.670
6.	1. Mahyudin, SH., MH, 2. Sarudi, SH., 3. Dr. H. M. Suryadi, SH.,MH	Inta Bin Sasmita	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor	- Penjara 5 tahun, denda Rp 250 juta, subside pidana kurungan 6 bulan - Bayar uang pengganti Rp 469.750.206.00
7.	1. Mahyudin, SH.,MH 2. Yudissilen, SH., 3. Rakhman Silaen, SH.,MH	Sadeli	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor	- Penjara 5 tahun dan 6 bulan, denda Rp 200 juta, diganti kurungan 3 bulan - Bayar uang pengganti Rp 538.825.168,87
8.	1. Mahyuddin, SH., MH, 2. Sarudi, SH 3. Dr. H. M. Suryadi, SH.,MH	Syhabudi, S.Sos., M.Si als Budi bin Hamzah	- Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor	- Penjara 1 tahun, denda Rp 50 juta, subsider 1 bulan - Bayar uang pengganti Rp 150 juta
9.	1. Mahyuddin 2. Sarudi 3. Suryadi	Abdul Samad Als Samad Bin Arsyad	Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 4 tahun, denda Rp 50 juta, subsider 1 bulan penjara - Bayar uang pengganti Rp 188.345.073
10.	1. Mahyudin, SH.,MH 2. Sarudi, SH 3. Rakhman Silaen, SH.,MH	Ari Kurniawan	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP	- Penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta, diganti kurungan 2 bulan - Bayar uang pengganti Rp 301.636.700

11.	1. Saut MARuli Tua Pasaribu 2. Yudissilen 3. Rakhman Silaen	Rahmiwati	- Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 5 tahun, denda Rp 200 juta, subsider 1 bulan penjara - Bayar uang pengganti Rp 1.298.082.000
12.	1. H. Dasniel S.H., M.H 2. Tony Pribadi,S.H., M.H 3.H. Yusdirman Yusuf, S.H., M.H	Zurman Bin Musa	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	- Penjara 8 tahun, dikurangi masa tahanan, denda Rp 300 juta, subsidaair 6 bulan penjara - Bayar uang pengganti Rp 1.162.000.000
13.	Saut Maruli Tua Pasaribu Yudissilen Rakhman Silaen	Irawan Saryono	Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 4 tahun, denda Rp 200 juta, subsider 1 bulan penjara
14.	1. Saut Maruli Tua Pasaribu, SH.,MH 2. Iwan Irawan, SH 3. Hendri, SH.,MH	Makmur Alias Aan	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP	- Penjara 6 tahun, denda Rp 500 juta, subsidair kurungan 3 bulan - Bayar uang pengganti Rp 60.500.000.000
15.	1. Iwan Irawan,SH 2. Mahyudin,SH.,MH 3. Darlina Darwis, SH,MH.	Wandri Zaldi als Iwan Bin Bakri	Pasal 5 Ayat (1) Huruf (b) UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	- Penjara 2 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta, bila denda tak dibayar diganti kurungan 3 bulan
16.	1. Sarudi, S.H., 2. Yudissilen, S.H.,M.H. 3. Poster Sitorus, S.H.,M.H.,	Jaafar Bin Alm. Karim	- Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP jo Pasal 193 Ayat 1 jo Pasal 197 KUHP	- Penjara 3 tahun, denda Rp 150 juta, bila tidak dibayar ganti kurungan 3 bulan - Bayar uang pengganti Rp 192.314.000
17.	1. Sarudi 2. Yudissilen 3. Poster Sitorus	Andri Wahyudi Bin Rozali	Pasal 3 jo Pasal 18 Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 4 tahun, denda Rp 150 juta. - Bayar uang pengganti Rp

				548.837.000
18.	1. Sarudi 2. Yudissilen 3. Poster Sitorus	Subandi Bin Saleh	Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 4 tahun, denda Rp 150 juta, subsider tiga bulan kurungan - Bayar uang pengganti Rp 312.604.000 juta, subsider 2 tahun penjara
19.	1. Iwan Irawan 2. Mahyudin 3. Suryadi	Juliansyah S.Sos Bin Alm Rosidi	Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 3 tahun, denda Rp 50 juta -Bayar uang pengganti Rp 75 juta
20.	1. Iwan Irawan 2. Mahyudin 3. Suryadi	Darman S.Sos Bin Alm Fadir Ibrahim	Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 3 tahun, denda Rp 50 juta, subsider 1 bulan penjara -Bayar uang pengganti Rp 25 juta
21.	1. Iwan Irawan, SH 2. Mahyudin, SH., MH 3. Dr. H.M. Suryadi, SH., MH,	Muhidin Shaleh Als. Muhidin	Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	- Penjara 3 tahun, denda Rp 50 juta, bila tidak dibayar ganti kurungan 1 bulan - Bayar uang pengganti Rp 297 juta
22	1. Iwan Irawan, SH 2. Mahyudin, SH., MH 3. Dr. H.M. Suryadi, SH., MH,	Muliadi Sitorus, ST	- Pasal 3 jo Pasal 18 UU jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	- Penjara 3 tahun, denda Rp 50 juta, bila tidak dibayar ganti kurungan 1 bulan - Bayar uang pengganti Rp 179.020.000
23.	1. Irawan, SH 2. Mahyudin, SH., MH 3. Dr. H.M.Suryadi, SH., MH,	Gunanto Als Igun Bin H. Sukarmin	Pasal 3 jo Pasal 18 UU jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	- Penjara 3 tahun, denda Rp 50 juta, bila tidak dibayar ganti kurungan 1 bulan - Bayar uang pengganti Rp 94 juta
24.	1. Yudissilen, S.H., M.H., 2. Sarudi, S.H., 3. Hendri, S.H., M.H.,	Narso Als Narso	Pasal 11 UU Tipikor	- Penjara 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta, bila tidak dibayar diganti kurungan 3 bulan

25.	1. Saut Marulitua Pasaribu 2. Poster Sitorus 3. Hendri	Edi Arifin Als Edi Bin Arifin	Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana	- Penjara 1 tahun 4 bulan, denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan penjara
26.	1. Saut Maruli Pasaribu, S.H., M.H. 3. Sarudi, S.H. 3. Darlina Darwis, S.H., M.H.,	Suheri Terta	-	Bebas
27.	Lilin Herlina Sarudi Poster Sitorus	Amril Mukminin	Pasal 12 Huruf A UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana	- Penjara 6 tahun, denda Rp 500 juta dan pencabutan hak politik 3 tahun.

- a. Putusan hakim rata-rata kurang dari tuntutan jaksa, baik hukuman penjara maupun denda. Padahal tuntutan tersebut kurang dari maksimal. Putusan hakim juga keliru dalam perkara Abdul Samad, terkait jumlah denda. Majelis menetapkan denda Rp 50 juta, padahal denda paling sedikit dalam Pasal 2 Ayat (1) Rp 200 juta.
- b. Majelis Hakim PN Pekanbaru yang membebaskan terdakwa antara lain, Yudisilen, Yanuar Anadi, Maruli Tua Pasaribu, Darlina Darwis dan Sarudi. Nama terakhir ada dalam 4 perkara yang dibebaskan.

4. Ahli

No.	Nama	Institusi	Jabatan	Kedudukan Ahli	Terdakwa & Jabatan
1.	SYUFRIATI, S.Sos.,M.Si	Inspektorat Kabupaten Kampar	Auditor Madya	Penuntut Umum	MISWOYANTO ALS PARMIN BIN TARMAN. ALM
2.	1. DR. ERDIANTO, S.H., M.Hum ,	Universitas Riau	Dosen dan Pimpinan Laboratorium, Fakultas Hukum UNRI.	Penuntut Umum	SUHASMAN , S.PI.,MSI Bin HASIDUN
	2. MIKAEL PH TOGATOROP,S.H.,M.Hum., CLA ,	BPKP Prov. Riau	Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Riau		

	3. MUHAMMAD HUSNU ABADI, S.H., M.Hum., Ph.D.,	UIR	Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara/ dan termasuk Hukum Administrasi yang mengatur seluk beluk Keuangan Daerah.		
3.	1. DR. ERDIANTO, S.H., M.Hum .,	Universitas Riau	Dosen dan Pimpinan Laboratorium, Fakultas Hukum UNRI.	Penuntut Umum	DEDI SUSANTO, SE.,MPA Bin H. YURLIS
	2. MIKAEL PH TOGATOROP,S.H.,M.Hum., CLA ,	BPKP Prov. Riau	Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Riau		
	3. MUHAMMAD HUSNU ABADI, S.H., M.Hum., Ph.D.,	UIR	Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara/ dan termasuk Hukum Administrasi yang mengatur seluk beluk Keuangan Daerah.		
4.	1. DR. ERDIANTO , S.H., M.Hum .	UNRI		Penuntut Umum	MEGA FITRI, S.P, M.S.I. Binti SOFYAN
	2. M IKAEL PH TOGATOROP, S.H.,M.Hum., CLA	Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Riau			
	3. MUHAMMAD HUSNU ABADI, S.H., M.Hum., Ph.D.,	UIR	Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara/ dan termasuk Hukum		

			Administrasi yang mengatur seluk beluk Keuangan Daerah.		
5.	1. JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.,MSi	Inspektorat Riau	Ahli (pemeriksaan dalam pengelolaan keuangan daerah)	Diajukan penuntut umum	DR. Drs. H. ABDULLAH SULAIMAN, M.Hum
	2. Dr. MEXSASAI INDRA, SH., MH	Universitas Riau	Ahli Hukum Administrasi negara		
	3. Dr. MUKHLIS. R, SH.,MH	Universitas Riau	Ahli hukum pidana		
6.	1. T. IZMAR SYAWINDRA, S.H .,	Inspektorat Kab. Siak	Pejabat Fungsional Auditor Muda	Diajukan oleh Penuntut Umum	INTA Bin SASMITA
	2. Dra. FARIDA KURNIANINGRUM,M.M .,	Ditjen Bina Pemerintah Desa Dalam Negeri Republik Indonesia	Kepala Sub Direktorat Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		
7.	JONI SUSILO, SP.,MH	ASN pada Inspektorat Kabupaten Siak	Auditor Madya	Diajukan oleh Penuntut Umum	SADELI
8.	Drs.KARUDDIN PURBA, Ak., MM	BPKP Riau	Auditor	Diajukan oleh Penuntut Umum	SYAHBUDI, S.Sos., M.Si. Als BUDI Bin HAMZAH
9	Karuddin Purba	Badan Penagawas keuangan dan Pembangunan	Auditor	Diajukan Jaksa Penuntut Umum	ABDUL SAMAD Als SAMAD Bin ARSYAD
10.	PUTRA MAHARDIKA, S.T	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Siak	ASN	Diajukan Jaksa Penuntut Umum	ARI KURNIAWAN
11.	Syakran Rudi	PNS kementerian Keuangan RI	Ahli Hukum Keuangan Negara	Diajukan Jaksa Penuntut Umum	Rahmiwati

	Sunarta	PNS Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan	Audit Investigasi		
12.	Tidak ada data ahli (Pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru)				ZURMAN BIN MUSA
13.	Syakran Rudi	PNS kementerian Keuangan RI	Ahli Hukum Keuangan Negara	Diajukan Jaksa Penuntut Umum	IRAWAN SARYONO
	Sunarta	PNS Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan	Audit Investigasi		
14.	1. Muhammad Isfahani, ST., M.AP.	BPK	Ahli pemeriksa dan penghitungan kerugian keuangan negara	Diajukan Jaksa Penuntut Umum	MAKMUR alias AAN
	2. Dr. Ir. SANGRIYADI SETIO	ITB	Dosen (ahli konstruksi)		
	3. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si.	LKPP	Ahli bidang pengadaan barang dan jasa.		
	4. Dr. Chairul Huda, SH., MH.	UMJ	Dosen	Diajukan oleh terdakwa	
15.	Tidak ada data ahli	-	-	-	WANDRI ZALDI ALS IWAN BIN BAKRI
16.	Tidak ada ahli yang di ajukan	-	-	-	JAAFAR Bin Alm. KARIM
17.	Mara Sakti	Tim Inspektorat Kabupaten Bengkalis	Auditor	Diajukan Jaksa Penuntut Umum	ANDRI WAHYUDI Bin ROZALI
18.	Mara Sakti	Tim Inspektorat	Auditor	Diajukan Jaksa Penuntut	SUBANDI Bin SALEH

		Kabupaten Bengkalis		Umum	
19.	1. Virgo Trisep Harris	UNILAK	Ahli Teknis	Diajukan Jaksa penuntut Umum	Juliansyah S.Sos Bin Alm Rosidi
	2. Zulfa Andri	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan	Auditor		
	3. Muhammad Shalahuddin	UNRI	Ahli teknis	Diajukan Penasehat Hukum	
20.	1. Virgo Trisep Harris	UNILAK	Ahli teknis	Diajukan Jaksa penuntut Umum	Darman S.Sos Bin Alm Fadir Ibrahim
	2. Zulfa Andri	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Auditor		
	3. Muhammad Shalahuddin	UNRI	Ahli teknis	Diajukan Penasehat Hukum	
21.	1. Ir. VIRGO TRISEP HARIS, M.T.		Ahli Tekhnis	Diajukan Jaksa penuntut Umum	MUHIDIN SHALEH Als. MUHIDIN
	2. ZULFA ANDRI, ST,	BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan)	Auditor		
	3. MUHAMMAD SHALAHUDDIN	UNRI	Ahli tekhnis	Diajukan Penasehat Hukum	
22.	1. Ir. VIRGO TRISEP HARIS, M.T.	<u>UNILAK</u>	Ahli Tekhnis	Penuntut Umum	MULIADI SITORUS, ST
	2. ZULFA ANDRI, ST,	BPKP	ahli lingkup ilmu auditing dan akuntansi (audit penghitungan kerugian keuangan negara)		

	3. MUHAMMAD SHALAHUDDIN	UNRI	Ahli Tekhnis	Diajukan Penasehat Hukum	
23.	1. Ir. VIRGO TRISEP HARIS, M.T.	UNILAK	Ahli Tekhnis pemeriksaan dan pengukuran fisik dilapangan atas pekerjaan kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir	Penuntut Umum	GUNANTO ALS IGUN BIN H. SUKARMIN
	2. ZULFA ANDRI, ST	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Ahli audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara		
	3. MUHAMMAD SHALAHUDDIN	UNRI	Ahli Teknis	Terdakwa	
24.	Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum	UNRI	Dosen FH	Penuntut Umum	NARSO Als NARSO
25	Tidak mengajukan				EDI ARIFIN Als EDI Bin ARIFIN
26.	1. Dr. SADINO, S.H., M.H	Univ. Al-Azhar Indonesia	Dosen/ ahli kehutanan	Terdakwa	SUHERI TERTA
	2. Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.,	UMJ	Dosen		
27.	1. Erdiansyah	UNRI	Dosen	Penasehat hukum	Amril Mukminin
	2. Zulkarnain	UIR	Dosen		

- a. Universitas Riau dan Universitas Islam Riau, dua kampus yang sering dan banyak beri rekomendasi pada akademisinya untuk memberi pendapat dalam persidangan. Selain diminta penuntut umum akademisi tersebut juga dihadirkan oleh Penasihat Hukum maupun terdakwa.